

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini persaingan semakin ketat dan kondisi ekonomi di Indonesia juga sedang tidak stabil sehingga individu seperti pelaku usaha atau kelompok masyarakat dituntut untuk jeli dalam melihat peluang usaha dalam rangka meningkatkan daya dan taraf hidup, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu di antaranya adalah dengan melakukan kegiatan usaha baik dari skala kecil hingga menengah. Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu daerah yang memiliki banyak unit UKM. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tahun 2017, jumlah UKM di DIY sebesar 99.514 unit usaha. Menurut data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

(DISKOP DIY) tahun 2017 UKM di DIY menyumbang 79,64% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan banyaknya jumlah UKM serta tingginya sumbangan UKM terhadap PDRB yang ada di DIY diharapkan dapat mengoptimalkan perekonomian yang ada di DIY sendiri, oleh karena ini pemerintah sebagai regulator diharapkan bisa memfasilitasi dan mengembangkan usaha-usaha yang telah ada ini sehingga dapat bertahan dan menjadi stabil hingga bersaing menjadi perusahaan yang unggul dan kompetitif. Usaha kecil menengah yang stabil dan terus berkembang akan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya sehingga akan baik bagi kondisi ekonomi di daerah tersebut.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri UKM memiliki peran yang penting bagi pertumbuhan ekonomi DIY, karena di DIY terdapat banyak UKM dan banyak masyarakat yang bergantung pada keberlangsungan bisnis UKM. Salah satu UKM di DIY yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah UKM pakaian jadi atau biasa disebut konfeksi. Tidak hanya di Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut data yang dirilis oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (KEMENPERIN) tahun 2019, tercatat pada kuartal pertama tahun 2019, industri pakaian jadi menjadi sektor yang tingkat pertumbuhannya paling tinggi yaitu sebesar 29,19%, sementara secara kuartal ke kuartal sektor ini tumbuh sebesar 8,79%, menjadi kedua tertinggi setelah industri furnitur di Indonesia. Industri pakaian jadi atau konfeksi mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat karena produk yang dihasilkan salah satunya adalah pakaian jadi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain makanan dan tempat tinggal, selain itu industri

ini juga akan terus berkembang karena setiap tahunnya muncul tren *fashion* terbaru sehingga persaingan di industri ini bisa dikatakan kompetitif.

Pertumbuhan yang pesat dari industri konfeksi di Daerah Istimewa Yogyakarta menyebabkan persaingan antar UKM yang bergerak di sektor konfeksi ini menjadi ketat. Dalam situasi persaingan seperti ini terdapat banyak tantangan. Tantangan yang dimaksud salah satunya adalah munculnya pesaing baru, persaingan harga yang semakin kompetitif dan kualitas produk yang semakin diperhatikan oleh pelanggan membuat perusahaan harus mampu menghasilkan informasi yang akurat yang bisa membantu pelaku usaha atau manajemen dalam menentukan harga jual yang kompetitif. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh manajer dalam menentukan harga jual adalah informasi mengenai biaya produksi suatu produk atau biaya produk.

Menurut Hansen dan Mowen (2007), biaya produksi adalah biaya yang berhubungan dengan pembuatan produk dan penyediaan jasa bagi konsumen. Biaya produksi terdiri dari tiga komponen yaitu Biaya Bahan Baku (BBB), Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL) dan Biaya *Overhead* Pabrik (BOP). Informasi mengenai biaya produksi ini harus diperhitungkan dan ditentukan dengan akurat agar informasi biaya produk yang dihasilkan dapat diandalkan. Apabila informasi yang dihasilkan keliru maka perusahaan akan salah dalam mengambil keputusan dalam menentukan harga jual.

Blocher *et al* (2010), mendefinisikan penentuan biaya produk (*product costing*) sebagai proses pengumpulan, pengklasifikasian dan penentuan biaya-biaya

yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Dalam menentukan biaya produk, perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan dan membebankan ketiga komponen biaya yang ada, yaitu BBB, BTKL dan BOP secara tepat. Mencatat, menghitung, mengklasifikasikan BBB dan BTKL bisa dilakukan lebih mudah oleh perusahaan namun hal tersebut cukup sulit dilakukan untuk BOP, hal ini karena BOP diasumsikan sebagai biaya tidak langsung sehingga sulit untuk dilakukan pelacakan (Mulyadi, 2014).

Penelitian sebelumnya mengenai penentuan biaya produk yang dilakukan oleh Sunarni (2012), dengan judul "*Product Costing Practices: Evidence from SMEs Throughout Jogjakarta Province, Indonesia*", mengungkapkan fakta bahwa sebagian besar perusahaan menggunakan metode tarif tunggal dalam menentukan biaya overhead pabrik. Penggunaan metode ini dapat menyebabkan distorsi biaya, yang dimana informasi biaya yang dihasilkan tidak akurat. Selain itu penelitian juga menemukan bahwa seluruh perusahaan yang berpartisipasi memiliki biaya overhead pabrik di atas 10%.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rasanjani (2016), dengan judul "*Praktik-praktik Penentuan Harga Pokok Produksi pada Industri Kecil-Menengah di DIY*", juga menghasilkan hal serupa yaitu sebagian besar perusahaan yang berpartisipasi memiliki BOP dengan rasio 10-20%. Penelitian ini juga meneliti mengenai klasifikasi biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung sebagai BOP, yang di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan telah mengklasifikasikan biaya bahan penolong sebagai BOP,

sedangkan untuk biaya tenaga kerja tidak langsung sendiri masih diklasifikasikan sebagai biaya tenaga kerja langsung.

Dalam penelitian oleh Lindungan (2012) dengan judul “*Praktik Penentuan Biaya Produk pada 10 Perusahaan Kecil Menengah di Yogyakarta*” juga menyimpulkan hal yang sama yaitu sebagian besar perusahaan kecil menengah belum sesuai dengan teori akuntansi biaya dalam mengklasifikasikan biaya bahan penolong sebagai BOP, namun dalam praktik pengklasifikasian biaya tenaga kerja langsungnya sebagian besar perusahaan telah sesuai dengan teori akuntansi biaya.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu bisa disimpulkan bahwa sebenarnya sebagian besar UKM di DIY masih belum bisa menentukan biaya produk dengan akurat. Bisa dilihat bahwa pelaku UKM keliru dalam mengklasifikasikan dan membebankan BOP ke produk. Padahal dengan pertumbuhan jumlah produksi yang tinggi, seharusnya pelaku UKM khususnya industri konfeksi diharapkan sudah bisa menentukan biaya produk dengan akurat dan sesuai dengan kaidah akuntansi biaya. Informasi biaya produk yang akurat bagi pelaku UKM konfeksi di DIY memiliki banyak manfaat yaitu, dapat mengetahui secara akurat berapa sebenarnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk sebuah produk, sehingga tidak terjadi distorsi biaya atau yang dibebankan ke produk terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Selain itu informasi biaya produk yang akurat bermanfaat sebagai dasar dalam menentukan harga jual sebuah produk, bermanfaat dalam mengontrol biaya dan aktivitas, sebagai informasi untuk menolak atau menerima pesanan. Kemudian informasi biaya produk yang akurat juga bermanfaat sebagai penyusunan anggaran maupun perencanaan yang efektif bagi usaha

konfeksi. Manfaat dari informasi ini juga bisa membantu pelaku UKM konfeksi di DIY dalam mengambil keputusan jangka pendek maupun jangka panjang dan dapat membantu pelaku UKM untuk memberikan potongan harga atau diskon bagi pelanggan, dan bermanfaat untuk menentukan berapa jumlah minimal unit yang harus di produksi untuk mencapai titik impas (*Break-even point*) atau keadaan dimana perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Manfaat-manfaat ini dapat membuat pelaku usaha konfeksi skala kecil dan menengah dapat terus bertahan, berkembang dan bahkan mampu bersaing di iklim bisnis yang semakin kompetitif ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik-praktik dalam menentukan biaya produk pada usaha konfeksi skala kecil dan menengah di DIY. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian **“Praktik-praktik Penentuan Biaya Produk pada Usaha Konfeksi skala Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana praktik penentuan biaya produk yang selama ini dilakukan oleh usaha konfeksi skala kecil menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta ?”. Praktik penentuan biaya produk yang dimaksud adalah :

1. Bagaimana praktik yang dilakukan oleh usaha konfeksi skala kecil menengah di DIY dalam mengklasifikasikan dan membebankan biaya

produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik?

2. Bagaimana metode pembebanan BOP yang dilakukan oleh usaha konfeksi skala kecil menengah di DIY? Serta dasar alokasi apa yang digunakan dalam mengalokasikan BOP?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penentuan biaya produk pada usaha konfeksi skala kecil menengah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian. Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Usaha kecil menengah sesuai dengan Undang-undang No.28 tahun 2008
2. Memenuhi kriteria usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64 (PERMENPERIN) tahun 2019 :

Usaha Kecil : 5 – 19 orang

Usaha Menengah : 20 – 99 orang

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Usaha Konfeksi skala Kecil Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kiranya penelitian ini bisa memberikan manfaat berupa informasi dan bahan evaluasi bagi usaha konfeksi skala kecil dan menengah mengenai bagaimana praktik penentuan biaya produk yang seharusnya bagi para pelaku usaha, sehingga kinerja perusahaan bisa menjadi lebih baik dan mampu bersaing.

2. Bagi pemerintah

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan terhadap program-program pemerintah mendatang terutama dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan wirausaha mengenai penentuan biaya produk bagi perusahaan kecil menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta.